



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

SKRIPSI


**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN DAERAH
(STUDI KASUS : KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT)**

Oleh

**HELVYRA
06151079**

**Mahasiswa Program S-1
Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi*

	No. Alumni Universitas	HELVYRA	No. Alumni Fakultas
	BIODATA		

a) Tempat/tanggal lahir : Padang / 14 Desember 1987 b) Nama Orang Tua : Alm. Azwar & Helmi B c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) NO BP : 06151079 f) Tanggal Lulus : 14 Mei 2010 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,11 i) Lama Studi : 3 tahun 8 bulan h) Alamat Orang Tua : Jl. Sisingamangaraja II, No. 5A, RT 01 RW 03, Padang.

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah
(Studi Kasus : Kabupaten/Kota di Sumatera Barat)**

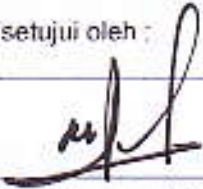
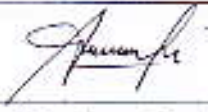

Skripsi S1 oleh: Helvyra Pembimbing Skripsi: Drs. H. Masrizal. M. Soc. Sc.

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Kemandirian daerah ini nantinya dicerminkan oleh variabel Kapasitas Fiskal sebagai variabel dependen. Adapun variabel-variabel yang dianalisis adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP). Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana hubungan variabel PDRB, PAD, dan BHP terhadap Kapasitas Fiskal serta untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah dan memberikan langkah kebijakan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder periode tahun 2000-2007. Setelah melakukan pengolahan data dengan menggunakan data panel gabungan *cross section* dengan *time series*, maka diperoleh penemuan empiris bahwa variabel PAD dan BHP berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal, sedangkan variabel PDRB yang dianggap sebelumnya sebagai variabel yang dapat meningkatkan kemandirian daerah melalui pengelolaan potensi sektoral daerah ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Terkait dengan hasil analisis yang dihasilkan, yaitu semua daerah sebaiknya dapat mengelola dengan baik variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kemandirian daerah tersebut.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 14 Mei 2010


Abstrak telah disetujui oleh :

Tanda Tangan	1. 	2. 	3. 
Nama Terang	Drs. H. Masrizal. M.Soc. Sc	Drs. Amra Ausri	Drs. Zamzami Munaf, MA

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing

NIP. 130 812 952


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumnus :

Petugas Fakultas/Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota telah memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU nomor 22 tahun 1999 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah diikuti oleh UU nomor 25 tahun 1999 (UU-PKPD) tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah yang mengatur aspek desentralisasi fiskal.

Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah, mulai dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya. Menurut Mardiasmo (2002) sejak saat itu, wacana otonomi daerah mengemukakan dengan berbagai dilema baru yang perlu pula memperoleh solusi baru, yang sejalan dengan perkembangan politik dalam era reformasi serta sekaligus sebagai pelaksanaan terhadap UUD 1945 yang didalamnya disebutkan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Wacana tersebut memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan dapat merangsang terhadap adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal.

Pertimbangan yang juga mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. (Halim, 2002)

Menurut Saragih (2003), kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian.

Dalam perkembangannya kebijakan ini disempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang : "Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah". Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah dikarenakan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Adanya kewenangan yang dimiliki ini memberikan konsekuensi adanya tuntutan peningkatan kemandirian daerah (Sidik, 2002). Daerah diharapkan mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi (peningkatan kesejahteraan masyarakat). Untuk itu, pemerintah daerah seyogyanya lebih berkonsentrasi pada

BAB VI

PENUTUP

6. 1. Kesimpulan

Seperti yang telah dijabarkan pada Bab-Bab sebelumnya bahwa penelitian ini menganalisis hubungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP) terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka ada beberapa kesimpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Pertumbuhan PDRB riil daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat pada periode tahun 2000-2007 mengalami peningkatan tetapi relatif rendah yaitu sebesar 4,7 % tiap tahunnya.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kemandirian daerah. Selama periode tahun 2000-2007 perkembangan PAD kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan PAD riil daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat cukup tinggi dimana mencapai 32,08 % tiap tahunnya.
3. Selama periode tahun 2000-2007 pertumbuhan Bagi Hasil Pajak (BHP) riil daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup tinggi sebesar 23,94 % tiap tahunnya.
4. Berdasarkan hasil regresi, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kapasitas Fiskal kabupaten/kota di

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa-Bali)*. Jurnal
- _____. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- _____. 2007. *Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi*. The 1st National Accounting Conference. Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- _____. 2008. *Relevansi Transfer Pemerintah Pusat Dengan Upaya Pajak Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa)*. Jurnal Kritis. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga
- Adriansyah. 2003. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Pelaksanaan Otda*.
- Allers, Maarten A. 2008. *Fiscal Capacity Equalisation in Tanzania*. University of Groningen, the Netherlands. Jurnal
- Bastian, Indra. 2001. "Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah", edisi Pertama, PPA FE UGM, Yogyakarta.
- Bohte, John dan Kenneth J Meier. 2000. *The Marble Cake : Introducing Federalism to The Government Growth Equation*. Publius. Summer. Hal : 35 – 99.
- Brodjonegoro, Bambang Permadi. 2006. *Desentralisasi Sebagai Kebijakan Fundamental Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Mengurangi Kesenjangan Antar Daerah Di Indonesia*. FE UI. Jakarta.
- Brodjonegoro et all. 1999. *Distribusi Dana Alokasi Umum (DAU) : Konsep dan Formula Alokasi*. Usulan Kepada BAKD- BAKM, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Cahyono, Adi Tri. 2006. *Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Kedungsapur Propinsi Jawa Tengah Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah*. Jawa Tengah.